

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

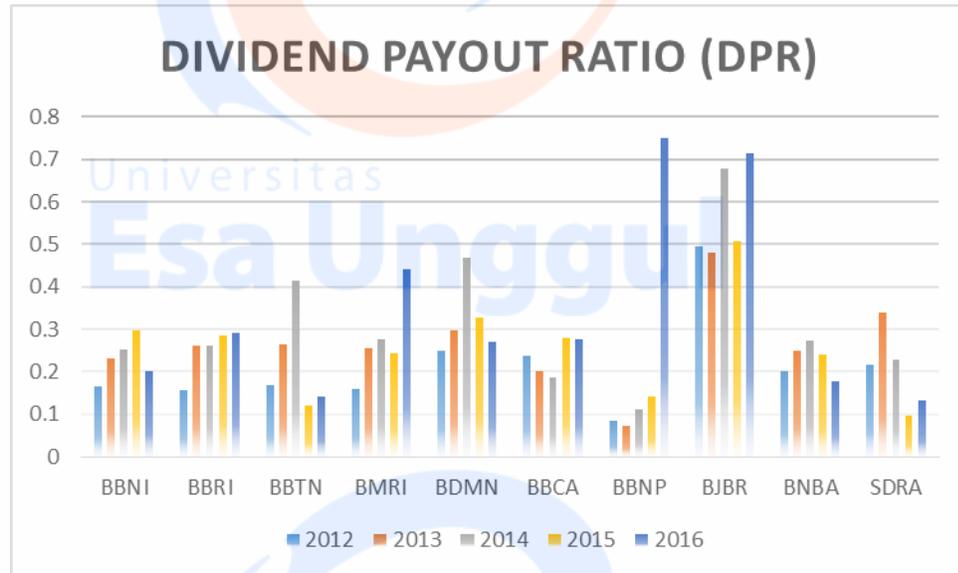
Pada umumnya investor lebih memilih menerima timbal hasil berupa dividen tunai dari pada *capital gain*, hal ini disebabkan karena dividen tunai dianggap lebih pasti dan bisa langsung dirasakan hasilnya. Dividen tunai yang diharapkan investor adalah dividen tunai yang mengalami peningkatan atau setidaknya konsisten dari tahun ke tahun. Kenyataannya tidak semua perusahaan membagikan dividen secara konsisten atau bahkan beberapa perusahaan ada yang tidak membagikan dividen tunai. Apabila terjadi peningkatan dividen akan dianggap sebagai berita baik (*good news*) yang berarti perusahaan mempunyai prospek yang baik, sehingga menimbulkan reaksi harga saham yang positif. Sebaliknya jika terjadi penurunan dividen dianggap sebagai berita buruk (*bad news*) yang berarti perusahaan tidak mempunyai prospek yang baik, sehingga menimbulkan harga saham yang negative.

Biasanya sebagian EAT (*Earning After Tax*) dibagi dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali, oleh karena itu manajemen harus membuat kebijakan atau yang dikenal dengan kebijakan dividen (*dividend policy*).

Secara definisi, kebijakan dividen ialah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah dan memperkuat modal perseroan, guna pembiayaan investasi serta mendukung kegiatan operasional di masa yang akan datang.

Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah laba yang ditahan yang akan mengurangi sumber dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Apabila perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen akan bisa memperbesar sumber dana intern dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan.

Perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Berikut adalah hasil yang dilakukan di perusahaan perbankan yang diambil secara acak dari tahun 2012-2016.



Sumber: Data Diolah

Gambar 1.1 Grafik Pergerakan DPR Periode 2012-2016

Dari hasil grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya perusahaan mengalami fluktuasi dalam pembagian dividen sehingga tidak konsisten. Jika dihitung secara rata-rata pembagian dividen dengan ke 10 (sepuluh) perusahaan memiliki rata-rata sebesar 1,38 persen. Historis data pembayaran dividen dari suatu perusahaan dapat menjadi acuan pokok analisis fundamental bagi para investor untuk menilai kekuatan (tingkat pertumbuhan keuntungan) perusahaan dari tahun ke tahun secara kontinyu. Suatu perusahaan yang konsisten meningkatkan pembayaran dividen dari masa ke masa menunjukkan indikasi yang jelas bahwa perusahaan tersebut telah kuat dan banyak menghasilkan keuntungan serta kecil kemungkinan terancam dari ketidakpastian pasar dan kelesuan ekonomi.

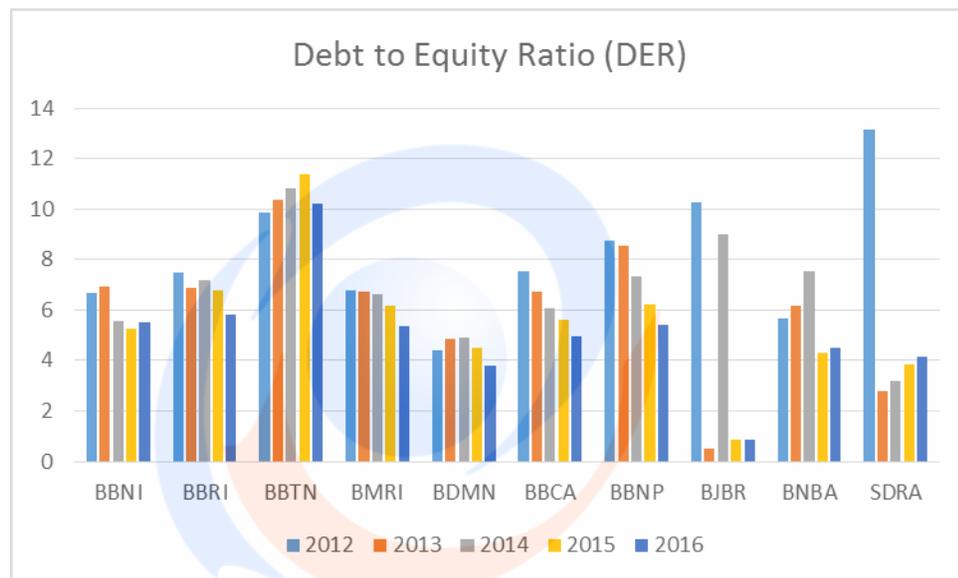
Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan bahwa¹, pada tahun 2016 setoran dividen bank pelat merah tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah bank BUMN. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyerahkan *pay out ratio* terbesar ke pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank berkode emiten BMRI ini menyetujui pembagian dividen Rp 6,21 triliun. Total dividen ini setara 45% dari laba perusahaan tahun lalu yang sebesar Rp 13,8 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pun sebelumnya telah mengumumkan pembagian 40% laba bersih tahun lalu sebagai dividen. Total dividen yang diberikan oleh BRI menjadi yang terbesar dari seluruh dividen bank pelat merah.

Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyetujui pembagian dividen Rp 3,96 triliun atau sebesar 35% dari laba bersih tahun 2016 sedangkan sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan. Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memutuskan untuk membagikan *pay out ratio* dividen sebanyak 20% dan sebesar 80% dari laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan.

Apabila perusahaan mengalami keterbatasan laba ditahan, perusahaan cenderung memanfaatkan hutang namun bila penggunaan hutang terlalu besar dapat berdampak pada *financial distress* dan kebangkrutan. Berdasarkan dampak

¹ <http://keuangan.kontan.co.id/news/2016-dividen-bank-bumn-tertinggi-sepanjang-sejarah?page=1>, Diakses pada Minggu 21 Mei 2017, Jam 21.00

ini apabila perusahaan ingin menghindari hutang yang tinggi, maka laba perusahaan dialokasikan ke laba ditahan yang digunakan untuk operasi perusahaan dan investasi di masa yang akan datang sehingga akan mengurangi penggunaan hutang yang akan semakin rendah terhadap kebijakan dividen.



Sumber: Data Diolah

Gambar 1.2 Grafik Pergerakan DER Periode 2012-2016

Dari hasil grafik diatas menunjukkan *debt to equity ratio* (DER) pada tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan rata-rata sebesar 31,49. Nilai maksimum tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 13,16 dan titik minimum pada tahun 2013 sebesar 0,49. Dapat dilihat terjadinya fluktuasi hutang yang dimiliki oleh perusahaan yang menandakan perusahaan akan mengurangi pembayaran dividen

karena sebagian besar keuntungan digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pinjaman atas hutang yang dimilikinya.

Terdapat lima perusahaan pelat merah memiliki total utang US\$31,59 miliar setara dengan Rp 448,57 triliun per 30 Juni 2015. Total pinjaman itu turun tipis 3,29% dari akhir tahun lalu US\$32,67 miliar. Kelima perusahaan pelat merah pemilik utang terbesar adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Bank Indonesia merilis posisi utang luar negeri BUMN selama lima tahun terakhir terus meningkat. Paruh pertama tahun ini, total utang luar negeri BUMN naik 12,99% *year on year* menjadi US\$61,07 miliar dari US\$54,05 miliar².

Pada masa Orde Baru Kebijakan privatisasi ditujukan untuk menutupi pembayaran utang luar negeri Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. Tahun 1985 utang luar negeri pemerintah sudah mencapai US\$25,321 miliar. Pada tahun 1991 jumlah utang luar negeri pemerintah membengkak hingga nyaris dua kali lipat menjadi US\$45,725 miliar. Jumlah utang luar negeri pemerintah terus bertambah hingga tahun 1995 mencapai US\$59,588 miliar. Pemasukan ari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 yang digunakan pemerintah untuk

² <http://finansial.bisnis.com/read/20150907/309/469740/wow-utang-5-bumn-ini-tembus-rp448-triliun>, Diakses pada Minggu 06 Agustus 2017, Jam 21.09

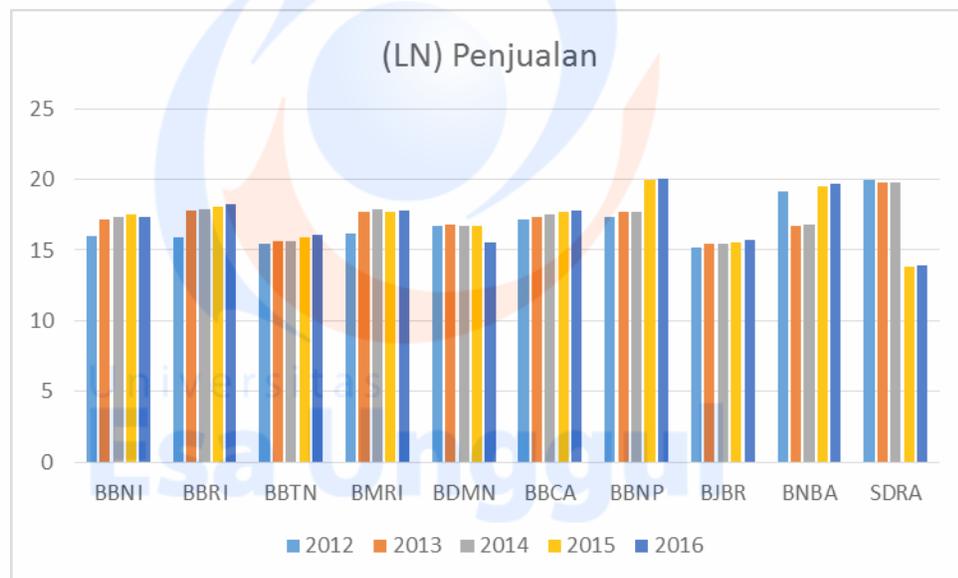
membayar utang luar negeri dapat menurunkan utang luar negeri pemerintah menjadi US\$53,865 miliar pada tahun 1997, namun utang luar negeri Indonesia terus naik hingga US\$214,5 miliar pada April 2011. Hal itu mungkin merupakan penyebab maraknya privatisasi mengingat jumlah utang yang sangat besar, namun upaya ini masih kurang efektif mengingat semakin banyaknya sector-sector penting yang telah di privatisasi.

Tujuan dari Pemerintah Republik Indonesia, lebih spesifik lagi dalam Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, atas kebijakan privatisasi BUMN yaitu memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, serta menciptakan struktur Indonesia yang sehat, kompetitif, menumbuhkan iklim usaha, ekonomi mikro, dan kapasitas pasar.

Privatisasi diarahkan bukan semata-mata untuk pemenuhan APBN, tapi lebih diutamakan untuk mendukung pengembangan perusahaan dengan metode utama melalui penawaran umum di pasar modal. Di samping juga untuk lebih mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG).

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran³.

Kebijakan dividen yang lebih besar cenderung kepada perusahaan yang berskala besar, hal ini disebabkan karena perusahaan yang berskala besar lebih mudah memasuki pasar modal sehingga lebih mudah untuk mendapatkan tambahan dana yang kemudian dapat meningkatkan profitabilitas yang akan berpengaruh kepada pembagian dividen.



Sumber: Data Diolah

Gambar 1.3 Grafik Pergerakan Ukuran Perusahaan periode 2012-2016

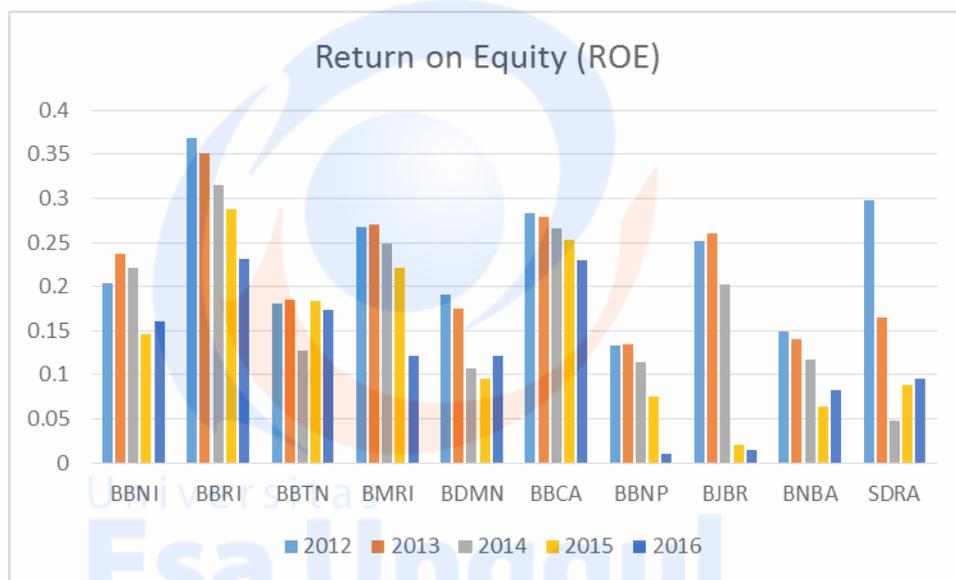
³ www.iaiglobal.or.id/v03/majalah-akuntan/files/April-Juni%202016/#/58, Diakses pada Kamis, 9 Februari 2017, Jam 09.32

Dari hasil grafik penelitian diatas menerangkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan tersebut pada tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebesar 85,87. Pada tahun 2016 maksimum tertinggi ukuran perusahaan pada titik 20,08 dan titik minimum yaitu 13,78 di tahun 2015. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan pada sector tersebut berskala kecil karena dibawah rata-rata 100%. Perusahaan dengan ukuran rendah lebih suka menahan labanya dalam bentuk laba ditahan daripada membaginya dalam bentuk dividen karena laba dialokasikan pada laba ditahan yang digunakan untuk kegiatan investasi perusahaan.

Ada temuan yang tampaknya berlaku umum di hampir semua Negara di dunia bahwa⁴ perusahaan swasta jarang yang membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Fenomena ini berbeda dengan perusahaan public yang diketahui pasti berusaha membayar dividen. Hal ini dilakukan oleh perusahaan public dalam rangka untuk menyiratkan informasi kepada para pelaku di pasar. Menjadi perusahaan public membawa banyak konsekuensi bagi perusahaan, karena para pelaku di pasar secara terus menerus memonitor perusahaan untuk melakukan prediksi atau estimasi dan memastikan bahwa investasi mereka adalah menjanjikan. Hal ini sesuai dengan teori tentang kebijakan dividen yaitu teori *clientele effect*, teori ini menyatakan bahwa kelompok (*clientele*) pemegang

⁴ Gumanti, Tatang Ary, *Kebijakan Dividen Teori, Empiris dan Implikasi*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta, Edisi Pertama, Oktober 2013, Hal. 32

saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai *Dividend payout ratio* yang tinggi (Pemegang Saham *Public*). Sebaliknya kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan.



Sumber: Data Diolah

Gambar 1.4 Grafik Pergerakan ROE Periode 2012-2016

Dari table grafik diatas dapat diketahui rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan adalah sebesar 0,89. Pada tahu 2012 titik maksimum perusahaan yang memiliki tingkat *Return on Equity* (ROE) tertinggi adalah 0,36 dan titik minimum 0,01 pada tahun 2016. Semakin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan

maka semakin besar membayar dividennya pula, tetapi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena laba yang diperoleh perusahaan dialokasikan pada laba ditahan untuk biaya investasi sehingga membayar dividen menjadi rendah.

Menurut hipotesis sinyal, investor dapat menduga informasi tentang laba mendatang perusahaan melalui sinyal yang muncul dari pengumuman dividen, baik dalam hal stabilitas maupun perubahan dividen. Namun demikian, agar hipotesis ini mampu dijalankan, manajer pertama kali harus memiliki informasi privat tentang prospek perusahaan dan memiliki dorongan untuk menyiratkan informasi tersebut ke pasar. Kedua, sinyalnya harus benar, artinya, perusahaan dengan prospek masa depan buruk seharusnya tidak mampu meniru dan mengirim sinyal yang tidak benar ke pasar dengan menaikkan pembayaran dividen. Jadi, pasar harus mampu menggunakan sinyal untuk membedakan kualitas perusahaan-perusahaan yang ada. Jika kondisi-kondisi tersebut dipenuhi, pasar seharusnya bereaksi positif terhadap pengumuman kenaikan dividen, dan sebaliknya bereaksi negative atas penurunan dividen (Ang, 1987; Koch dan Shenoy 1999)⁵. Artinya, sinyal yang mengandung informasi yang menguntungkan akan direspon positif oleh pasar, sebaliknya jika kandungan informasinya kurang menguntungkan, maka pasar akan merespon negative.

⁵ Ibid, Hal. 64

Salah satu asumsi dalam pasar modal yang sempurna menurut Miller dan Modigliani (1961) adalah tidak adanya konflik atau benturan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, atau antara agen dan pemilik. Praktiknya, asumsi tersebut dipertanyakan dimana pemilik perusahaan tidak dapat disamakan dengan manajemen perusahaan, begitu pula kepentingan manajer tidak harus sama dengan kepentingan pemilik, dan manajer kemungkinan untuk melakukan tindakan yang berdampak kurang menguntungkan bagi pemilik dikarenakan manajer yang mengetahui informasi perusahaan karena terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehingga bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dalam perusahaan sedangkan pemilik hanya bertugas mengawasi. Adanya hal tersebut maka timbul biaya keagenan yang terkait dengan pengawasan perilaku manajer, dan biaya keagenan karena adanya konflik atau benturan kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dan manajer (agen). Pembayaran dividen dapat menjadi perwujudan minat dan mengurangi masalah keagenan antara manajer dan pemilik dengan mengurangi penggunaan biaya atas kewenangan manajer (Rozeff, 1982; Easrerbrook, 1984; Jensen, 1986; Alli et al., 1993⁶).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Sisca, yang menguji Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen. Bahwa semakin tinggi kebijakan hutang maka semakin rendah kebijakan dividen.

⁶ Ibid, 66-67

Semakin tinggi kebijakan hutang maka akan semakin rendah kebijakan dividennya. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin rendah kebijakan dividen. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi kebijakan dividennya⁷.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kardanah, yang menguji Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen. Ukuran Perusahaan (*size*) terhadap *dividend payout ratio* dalam penelitian ini dapat terbukti. Dengan kata lain hasil ini sesuai atau mendukung hipotesis yang ada bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap DPR. Kebijakan hutang secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang dalam penelitian ini merupakan sinyal positif bagi para investor mengenai dividen yang akan diterima. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen⁸.

⁷ Dewi, Sisca Christianty, Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 10, No. 1, April 2008, 47-58

⁸ Kardanah, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen, *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2013

Penelitian yang dilakukan oleh Dian⁹ yang menguji Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Tunai dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah likuiditas tidak mempengaruhi profitabilitas dan ukuran perusahaan sementara efek leverage terhadap profitabilitas profitabilitas mempengaruhi kebijakan dividen tunai. Profitabilitas tidak dapat melakukan intervensi variable likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan tunai. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa jumlah leverage dan ukuran perusahaan terbukti mampu mempengaruhi profitabilitas rendah. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang besar tidak selalu memberikan dividen yang tinggi.

Dari penelitian tersebut diatas mengenai Kebijakan Dividen menunjukkan hasil yang tidak sama. Oleh sebab itu, penelitian ini dianggap masih perlu dilakukan untuk melihat hubungan Kebijakan Dividen pada Perusahaan BUMN yang telah di Privatisasi serta untuk melihat apakah Profitabilitas dapat memberikan pengaruh terhadap Kebijakan Dividen secara intervening.

Penulis termotivasi untuk meneliti Kebijakan Dividen pada Perusahaan BUMN yang telah di Privatisasi menjadi objek penelitian yang penting dan menarik dilakukan karena mengingat kebijakan dividen merupakan salah satu hal

⁹ Dewi, Dian Masita, Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Tunai dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, ISSN: 1412-3126, Maret 2016, Hal. 12-19

yang mendasari investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas entitas tersebut. Banyaknya hutang yang dimiliki oleh Perusahaan BUMN yang telah di Privatisasi sehingga kecil kemungkinan untuk membayar dividen. Serta berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta adanya ketidakteragaman hasil penelitian, peneliti ingin meneliti kembali hal-hal yang mempengaruhi pembagian dividen. Peneliti menggunakan variable Kebijakan Hutang dengan memproksikan *Debt to Equity Ratio*, Memproksikan Ukuran Perusahaan dengan LN *Total Sales*, Struktur Kepemilikan yang di proksikan dengan Kepemilikan Saham yang Beredar dan memproksikan Profitabilitas dengan *Return on Equity* (ROE) sebagai variable intervening.

Peneliti tertarik untuk menguji pengaruh kebijakan hutang, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham public dan profitabilitas sebagai variable intervening terhadap kebijakan dividen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variable intervening dan tahun penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG, UKURAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TELAH DI PRIVATISASI PERIODE 2012-2016 DAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembagian dividen yang dilakukan pengujian secara acak dengan 10 perusahaan perbankan selama 5 tahun terakhir dari 2012 sampai dengan 2016 mempunyai rata-rata pembagian dividen sebesar 1,38 persen. Di tahun 2016 ini merupakan sejarah pembagian dividen tertinggi, hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari situs berita.
2. Rata-rata *debt to equity ratio* (DER) perusahaan selama 5 tahun terakhir sebesar 31,49. Tingginya hutang yang dimiliki oleh perusahaan BUMN yang telah di privatisasi menandakan perusahaan akan mengurangi pembayaran dividen karena sebagian besar keuntungan digunakan untuk membayar bunga dan cicilan pinjaman atas hutang yang dimilikinya
3. Rata-rata ukuran perusahaan tersebut pada tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebesar 85,87. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan pada sector tersebut berskala kecil karena dibawah rata-rata 100%. Perusahaan dengan ukuran rendah lebih suka menahan labanya dalam bentuk laba ditahan daripada membaginya dalam bentuk dividen karena laba dialokasikan pada laba ditahan untuk menambah investasi perusahaan.
4. Ada temuan yang tampaknya berlaku umum di hampir semua Negara di dunia bahwa perusahaan swasta jarang yang membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Fenomena ini berbeda dengan perusahaan public yang diketahui pasti berusaha membayar dividen. Hal ini dilakukan oleh perusahaan public.

Hal ini sesuai dengan teori tentang kebijakan dividen yaitu teori *clientele effect*, teori ini menyatakan bahwa kelompok (*clientele*) pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan.

5. Rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan perbankan adalah sebesar 0,89. Semakin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan maka semakin besar membayar dividennya pula, tetapi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena laba yang diperoleh perusahaan dialokasikan pada laba ditahan untuk biaya investasi sehingga membayar dividen menjadi rendah.

C. Pembatasan Masalah

1. Peneliti hanya meneliti Perusahaan BUMN yang telah di privatisasi.
2. Periode yang diteliti juga terbatas dari tahun 2012-2016.
3. Variable penelitian terdiri atas tiga variable, yaitu independen, dependen dan intervening. Variable independen penelitian ini yaitu kebijakan hutang, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik, sedangkan variable dependen yaitu kebijakan dividen dan variable intervening yaitu profitabilitas.
4. Obyek penelitian disini adalah kebijakan dividen pada Perusahaan BUMN yang telah di Privatisasi pada Periode 2012-2016.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Profitabilitas secara simultan?
2. Apakah Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Profitabilitas secara parsial?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Profitabilitas secara parsial?
4. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Profitabilitas?
5. Apakah Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen secara simultan?
6. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen?
7. Apakah Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen secara parsial?
8. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen secara parsial?
9. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen secara parsial?
10. Apakah Profitabilitas merupakan variable mediasi antara Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan dengan Kebijakan Dividen?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaruh Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas
2. Untuk mengkaji pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Profitabilitas
3. Untuk mengkaji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas
4. Untuk mengkaji pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas
5. Untuk mengkaji pengaruh Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Kebijakan Dividen
6. Untuk mengkaji pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen
7. Untuk mengkaji pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Kebijakan Dividen
8. Untuk mengkaji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen
9. Untuk mengkaji Struktur Kepemilikan terhadap Kebijakan Dividen
10. Untuk mengkaji pengaruh Profitabilitas merupakan variable mediasi antara Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan dengan Kebijakan Dividen

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Investor, membantu investor untuk mengetahui porsi pembagian dividen (kebijakan dividen) dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan investasi.

2. Bagi emiten, membantu emiten dalam mengevaluasi ataupun menambahkan poin dan jenis informasi yang disediakan oleh perusahaan dalam laporan keuangan tahunan sehingga dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penambahan wawasan.
4. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan.